

DAKWAH DAN FENOMENA GERAKAN ISLAM LIBERAL

AHADR DJAMALUDDIN
MUSYARIF
SURIATI

IAIN Parepare

Email: djamaluddinahdar@gmail.com

Musyarif

IAIN Parepare

Email: Musyarif@gmail.com

Suriati

IAI Muhammadiyah Sinjai

Abstract: The thought of Islamic liberalization has been instilled since the Dutch colonial era. But systematically from within the body of Islamic organizations, the Islamic liberalization movement in Indonesia could begin in the early 1970s. On January 3, 1970, the general chairman of the Indonesian Student Association (PBHMI), Nurcholish Madjid, officially rolled out the need for Islamic secularization. Furthermore, the Liberal Islamic Network (JIL) group was founded by Utan Kayu activists, in Jakarta on April 8, 2001. This group contributed to the rise of liberalism and promoted the idea of JIL. Historically, the emergence of JIL was a response or counter-movement to radical fundamentalist movements in Indonesia that emerged shortly after the fall of Suharto in 1998. In its position as a group fighting for public space in Indonesia, JIL acts as a counter-discourse for Muslim radical-conservative groups who always call for the adoption of the Shari'a and the formation of an Islamic state of Indonesia. For JIL, Indonesia is a pluralistic nation that requires public space. Whatever concerns common affairs must be deliberated freely and democratically. During existence, JIL continues to support a system of democracy, freedom, and social equality. While ideologically, the formation of JIL can be seen as crystallization and continuation of previous Islamic thought and movements, both within the scope of Indonesia specifically and in the world in general

Keywords: Da'wah, Phenomenon, Islamic Movement, Liberal

Abstrak: Pemikiran liberalisasi Islam sudah ditanamkan sejak zaman penjajahan Belanda. Namun secara sistematis dari dalam tubuh organisasi Islam, gerakan liberalisasi Islam di Indonesia bisa dimulai pada awal 1970-an. Pada 3 Januari 1970, ketua umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Indonesia (PBHMI), Nurcholish Madjid, secara resmi menggulirkan perlunya dilakukan sekularisasi Islam. Selanjutnya, kelompok Jaringan Islam Liberal (JIL) didirikan oleh para aktivis Utan kayu, di Jakarta pada 8 April 2001. Kelompok ini turut mewarnai maraknya liberalism dan mempromosikan gagasan JIL. Secara historis, kemunculan JIL merupakan respon atau gerakan tandingan terhadap gerakan-gerakan fundamentalis-radikal di Indonesia yang mengemuka tidak lama setelah lengsernya Suharto pada tahun 1998. Dalam posisinya sebagai kelompok yang memperjuangkan ruang publik di Indonesia, JIL berperan sebagai counter discourse bagi kelompok-kelompok radikal-konservatif Muslim yang selalu menyerukan penerapan syariat dan pembentukan negara Islam Indonesia. Bagi JIL, Indonesia adalah bangsa majemuk/plural yang membutuhkan ruang publik. Apapun yang menyangkut urusan bersama harus dimusyawarahkan secara bebas dan demokratis. Selama keberadaannya, JIL terus mendukung sistem demokrasi, kebebasan, dan kesetaraan sosial. Sedangkan secara ideologis, terbentuknya JIL dapat dilihat sebagai kristalisasi dan kelanjutan dari pemikiran dan gerakan Islam sebelumnya, baik dalam lingkup Indonesia secara khusus maupun di dunia secara umum.

Keywords: Dakwah, Fenomena, Gerakan Islam, Liberal

A. Pendahuluan

Gagasan liberalisasi Islam, yang kemudian dikenal dengan sebutan Islam liberal dalam dunia pemikiran Islam akhir-akhir ini, khususnya di Indonesia, telah menimbulkan kontroversi dan perdebatan panjang. Ini karena banyaknya ide dan gagasan yang mereka usung sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar aqidah dan syariat Islam. Di antara ide yang paling menonjol adalah seperti mempertanyakan kesucian dan otentisitas al-Qur'an,

mengkritik otoritas nabi beserta hadits-hadits sahihnya, menghujat serta mendiskreditkan sahabat-sahabat Nabi dan para ulama.¹

Di samping itu kalangan Islam liberal juga menolak terhadap penerapan syariat Islam secara formal oleh negara. Dan untuk tujuan itu mereka mencoba berbagai alasan, terkadang penolakan tersebut dibuat atas dasar budaya dengan mengatakan bahwa hukum Islam tersebut tidak mencerminkan nilai-nilai dan budaya masyarakat hari ini.²

Liberalisme adalah sebuah ideologi, filsafat, dan tradisi politik yang didasarkan pada pemahaman bahwa kebebasan dan persamaan hak adalah nilai politik yang utama. Kata-kata liberal, liberty, libertian, dan libertine semua berasal dari bahasa latin 'liber' yang berarti 'bebas'.

Dalam konteks Indonesia, kata liberal telah disandingkan dengan kata Islam sebagai agama, kedua kata tersebut berpadu menjadi Islam liberal. Sesungguhnya Islam liberal adalah istilah yang sangat rancu. Dengan demikian, jangan aneh kalau segala bentuk 'ajaran' nya pun akan tampak semakin rancu karena memang berdiri di atas nama yang rancu. Dalam hal ini Nashruddin Syarief melalui karyanya *Menangkal Virus Islam Liberal* membuat catatan dengan menyatakan bahwa menyandingkan Islam dengan liberal sebenarnya merupakan sesuatu yang sangat problematik. 'Islam' artinya tunduk, patuh, berserah diri kepada Allah SWT. sementara liberal artinya bebas dari setiap otoritas. Jadi, jika Islam menuntut adanya kepatuhan kepada aturan ilahi, maka liberal menghendaki adanya kebebasan dari segala macam aturan ilahi. Itu artinya tidak mungkin Islam liberal. Islam ya Islam tidak dan bukan liberal. Hanya dikarenakan istilah ini sudah dibakukan oleh segilintir orang untuk menunjuk satu kelompok liberal dalam komunitas pemikir Islam,

¹Nirwan Syafrin, *Kritik Terhadap Paham Liberalisasi Syariat Islam* (Jakarta: Dewan Dakwah Islamiyyah Indonesia, 2008), 1-2.

²*Ibid.*

maka mau tidak mau dalam kajian ini kita mengikuti terlebih dahulu penggunaan istilah 'Islam liberal' tersebut.³

Berdasarkan hal tersebut dapat dipahami liberalism yang merupakan sebuah paham atau ideologi filsafat telah "menginvasi" wilayah-wilayah agama, terutama agama Islam, sehingga perlu untuk disikapi secara kritis. Apalagi doktrin liberalism yang digulirkan tidak sedikit mengaburkan keotentikan Islam yang sesungguhnya.

B. Sejarah Masuknya Pemikiran Liberal di Indonesia

Liberalisme tidak diciptakan oleh golongan pedagang dan industri, melainkan diciptakan oleh golongan intelektual yang digerakkan oleh keresahan ilmiah dan artistik umum pada zaman itu. Keresahan intelektual tersebut disambut oleh golongan pedagang dan industri, bahkan hal itu digunakan untuk membenarkan tuntutan politik yang membatasi kekuasaan bangsawan, gereja dan gilde-gilde. Mereka tidak bertujuan semata-mata untuk dapat menjalankan kegiatan ekonomi secara bebas, tetapi juga mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Masyarakat yang terbaik (rezim terbaik), menurut paham liberal adalah yang memungkinkan individu mengembangkan kemampuan-kemampuan individu sepenuhnya. Dalam masyarakat yang baik, semua individu harus dapat mengembangkan pikiran dan bakat-bakatnya. Hal ini mengharuskan para individu untuk bertanggung jawab pada segala tindakannya baik itu merupakan sesuatu untuknya atau seseorang. Seseorang yang bertindak atas tanggung jawab sendiri dapat mengembangkan kemampuan bertindak. Menurut asumsi liberalisme inilah, John Stuart Mill mengajukan argumen yang lebih mendukung pemerintahan berdasarkan demokrasi liberal. Dia mengemukakan tujuan utama politik ialah mendorong setiap anggota masyarakat untuk bertanggung jawab dan menjadi dewasa. Hal ini hanya dapat terjadi manakalah mereka ikut serta dalam pembuatan keputusan yang menyangkut hidup mereka. Oleh karena itu, walaupun

³Nashruddin Syarief, *Menangkal Virus Islam Liberal; Panduan Islamic Worldview untuk Para Aktivis Dakwah* (Bandung: Persis Pers, 2011), 5.

seorang raja yang bijaksana dan baik hati, mungkin dapat membuat putusan yang lebih baik atas nama rakyat dari pada rakyat itu sendiri, bagaimana pun juga demokrasi jauh lebih baik karena dalam demokrasi rakyat membuat sendiri keputusan bagi diri mereka, terlepas dari baik buruknya keputusan tersebut.

Liberalisme menginginkan keabsolutan dan kebebasan yang tidak terbatas dalam pemikiran, agama, suara hati, keyakinan, ucapan, pers dan politik. Di samping itu, liberalisme juga membawa dampak yang besar bagi sistem masyarakat Barat, di antaranya adalah mengesampingkan hak Tuhan dan setiap kekuasaan yang berasal dari Tuhan; pemindahan agama dari ruang publik menjadi sekadar urusan individu; pengabaian total terhadap agama Kristen dan gereja atas statusnya sebagai lembaga publik, lembaga legal dan lembaga sosial.⁴

Di Indonesia, sekularisme merupakan akar liberalism, masuk secara paksa melalui proses penjajahan, khususnya oleh pemerintah Hindia Belanda. Prinsip negara sekular telah termaktub dalam Undang-Undang Dasar Belanda tahun 1855 ayat 119 yang menyatakan bahwa pemerintah bersikap netral terhadap agama, artinya tidak memihak salah satu agama atau mencampuri urusan agama.

Prinsip sekular dapat ditelusuri pula dari rekomendasi Snouck Hurgronje kepada pemerintah kolonial untuk melakukan Islam Politik, yaitu kebijakan pemerintah kolonial dalam menangani masalah Islam di Indonesia. Kebijakan ini menindas Islam sebagai ekspresi politik. Inti Islam Politik adalah : (1) dalam bidang ibadah murni, pemerintah hendaknya memberi kebebasan, sepanjang tidak mengganggu kekuasaan pemerintah Belanda; (2) dalam bidang kemasyarakatan, pemerintah hendaknya memanfaatkan adat kebiasaan masyarakat agar rakyat mendekati Belanda; (3) dalam bidang politik atau kenegaraan, pemerintah harus mencegah setiap upaya yang akan membawa rakyat pada fanatisme dan ide Pan Islam.

⁴<http://www.mdn.org.my/?p=3085>. Diakses tanggal 20 Oktober 2019

Politik Etis yang dijalankan penjajah Belanda di awal abad XX semakin menancapkan liberalisme di Indonesia. Salah satu bentuk kebijakan itu disebut unifikasi, yaitu upaya mengikat negeri jajahan dengan penjajahnya dengan menyampaikan kebudayaan Barat kepada orang Indonesia. Pendidikan, sebagaimana disarankan Snouck Hurgronje, menjadi cara manjur dalam proses unifikasi agar orang Indonesia dan penjajah mempunyai kesamaan persepsi dalam aspek sosial dan politik, meski pun ada perbedaan agama.

Proklamasi kemerdekaan Indonesia tahun 1945 seharusnya menjadi momentum untuk menghapus penjajahan secara total, termasuk mencabut pemikiran sekular-liberal yang ditanamkan penjajah. Tapi sayang sekali ini tidak terjadi. Revolusi kemerdekaan Indonesia hanyalah mengganti rejim penguasa, bukan mengganti sistem atau ideologi penjajah. Pemerintahan memang berganti, tapi ideologi tetap sekular. Revolusi ini tak ubahnya seperti Revolusi Amerika tahun 1776, ketika Amerika memproklamkan kemerdekaannya dari kolonialisasi Inggris. Amerika yang semula dijajah lantas merdeka secara politik dari Inggris, meski sesungguhnya Amerika dan Inggris sama-sama sekular.

Ketersesatan sejarah Indonesia itu terjadi karena saat menjelang proklamasi (seperti dalam sidang BPUPKI), kelompok sekular dengan tokohnya Soekarno, Hatta, Ahmad Soebarjo, dan M. Yamin telah memenangkan kompetisi politik melawan kelompok Islam dengan tokohnya Abdul Kahar Muzakir, H. Agus Salim, Abdul Wahid Hasyim, dan Abikoesno Tjokrosoejoso. Jadilah Indonesia sebagai negara sekular.

Karena sudah sekular, dapat dimengerti mengapa berbagai bentuk pemikiran liberal sangat potensial untuk dapat tumbuh subur di Indonesia, baik liberalisme di bidang politik, ekonomi, atau pun agama. Dalam bidang ekonomi, liberalisme ini mewujud dalam bentuk sistem kapitalisme (*economic liberalism*), yaitu sebuah organisasi ekonomi yang bercirikan adanya kepemilikan pribadi (*private ownership*), perekonomian pasar (*market economy*), persaingan (*competition*), dan motif mencari untung (*profit*).

Dalam bidang politik, liberalisme ini tampak dalam sistem demokrasi liberal yang meniscayakan pemisahan agama dari negara sebagai titik tolak pandangannya dan selalu mengagungkan kebebasan individu. Dalam bidang agama, liberalisme mawujud dalam modernisme (paham pembaruan), yaitu pandangan bahwa ajaran agama harus ditundukkan di bawah nilai-nilai peradaban Barat.

C. Asas Pemikiran Liberal

Dalam Islam, khususnya ranah politiknya, terdapat dua jenis liberalisme. Pertama, kelompok yang berpandangan bahwa ide negara Islam liberal dimungkinkan dan diperlukan karena Islam memiliki semangat yang demokratis dan liberal. Kedua, kelompok yang berpandangan bahwa Islam memiliki ketentuan mengenai lembaga politik dan tidak banyak tuntutan agama yang mewajibkannya.⁵

Elemen-elemen terkait dengan liberalisme antara lain adalah sekularisme, modernitas, demokrasi, pluralisme, dan HAM.⁶ Greg Barton menjelaskan beberapa prinsip gagasan Islam liberal: (a) pentingnya kontekstualisasi ijtihad, (b) komitmen terhadap rasionalitas dan pembaruan, (c) penerimaan terhadap pluralisme sosial, (d) pemisahan agama dari politik dan adanya posisi non sektarian agama.⁷

Secara umum asas liberalisme ada tiga. Yaitu kebebasan, individualisme, rasionalis (*'aqlani*, mendewakan akal). Ketiga asas ini yang selalu dijadikan senjata oleh aktivis liberal untuk menjalankan misinya.

Selanjutnya, JIL (Jaringan Islam Liberal) sebagai institusi Islam liberal di Indonesia menjelaskan enam landasan karakteristik pemikirannya sebagai berikut:

⁵Nur Kholis Setiawan, *Akar-Akar Pemikiran Progresif dalam Kajian Al-Qur'an* (Yogyakarta: Elsaq, 2008), 18-20.

⁶*Ibid.*, 21.

⁷Greg Barton, *Gagasan Islam Liberal Di Indonesia* (Jakarta: Paramadina, 2002), 68.

1. *Membuka Pintu ijtihad pada Semua Dimensi Islam.*

Islam liberal percaya bahwa ijtihad atau penalaran rasional pada teks-teks keislaman pada al-Qur'an dan sunah adalah prinsip utama yang memungkinkan Islam terus bisa bertahan dalam segala kondisi perkembangan zaman. Menurut JIL, penutupan pintu ijtihad, baik secara terbatas atau secara keseluruhan, adalah ancaman atas Islam itu sendiri, sebab dengan demikian Islam akan mengalami pembusukan. Islam liberal juga mempercayai bahwa ijtihad bisa diselenggarakan dalam semua segi, baik segi *muamalat* (interaksi sosial), *ubudiyat* (ritual), dan *ilahiyyat* (teologi).⁸

2. *Mengutamakan Semangat Religio Etik, bukan Makna Literal Teks.*

Dalam memahami wahyu Allah, yang sering mereka sebut sebagai teks, JIL menggunakan landasan kedua sebagai kaidah ijtihad yang telah dikembangkan oleh Islam liberal yakni upaya menafsirkan Islam berdasarkan semangat religio etik al-Qur'an dan Sunah Nabi, bukan menafsirkan Islam semata-mata berdasarkan makna literal sebuah teks itu sendiri. Penafsiran yang literal hanya akan melumpuhkan Islam. Dengan penafsiran yang berdasarkan semangat religio-etik, Islam akan hidup dan berkembang secara kreatif menjadi bagian dari peradaban kemanusiaan universal.⁹

3. *Mempercayai Kebenaran yang Relatif, Terbuka, Liberal dan Plural.*

Landasan ketiga JIL menjelaskan bahwa relativisme yang sudah pasti muncul dalam setiap penerapan sekularisasi, sekularisme dan liberalisme. Karena kebenaran yang dipahami oleh manusia pada masa silam bisa diralat oleh generasi sekarang, dan kebenaran yang dipahami sekarang pun kelak (kemungkinan besar) akan diralat, maka kebenaran itu haruslah dinyatakan relatif, terbuka dan plural. JIL mendasarkan diri pada gagasan tentang kebenaran dalam penafsiran keagamaan sebagai sesuatu yang

⁸Akmal Sjafril, *Islam Liberal 101* (Bogor: Afnan Publishing, 2015), 94.

⁹*Ibid.*, 98.

relatif, sebab sebuah penafsiran adalah kegiatan manusiawi yang terkungkung oleh konteks tertentu, terbuka. Sebagaimana misalnya Islam liberal menerima kontradiksi yang begitu sengit dalam namanya yaitu antara Islam dan liberal, maka kelompok ini begitu saja menerima semua perbedaan yang sebenarnya mencolok di antara dua hal yang sebenarnya saling bertentangan, misalnya antara tauhid dan trinitas. Keduanya jelas berlawanan, namun berdasarkan prinsip relativisme keduanya harus diterima sebagai kebenaran. Sebab menurut JIL, setiap bentuk penafsiran mengandung kemungkinan penafsiran yang salah, selain kemungkinan benar plural, sebab penafsiran keagamaan, dalam satu dan lain cara, adalah cerminan dari kebutuhan seorang penafsir di suatu masa dan ruang yang bisa terus berubah-ubah. Dengan cara ini pula kalangan JIL menghindarkan diri dari perdebatan.¹⁰

4. *Memihak pada yang Minoritas dan Tertindas.*

Memihak pada yang minoritas dan tertindas begitu kental dengan nuansa yang melatarbelakangi kelahiran pemikiran sekuler Barat. Karena dulu gereja menghegemoni dan menindas rakyat, maka bangsa-bangsa Eropa umumnya memandang agama sebagai alat legitimasi untuk memaksakan kehendak. Menurut JIL, Islam liberal berpijak pada penafsiran Islam yang memihak kepada kaum minoritas yang tertindas dan dipinggirkan. Misalnya Ahmadiyah tidak mereka pandang sebagai aliran sesat karena tidak pernah ada kata sesat dalam relativisme atau telah keluar dari Islam, melainkan sebagai aliran yang ditindas oleh para ulama. Setiap struktur sosial-politik yang mengawetkan praktek ketidakadilan atas yang minoritas adalah berlawanan dengan semangat Islam. Minoritas di sini dipahami dalam maknanya yang luas, mencakup minoritas agama, etnik, ras, gender, budaya, politik, dan ekonomi. Pembelaan mereka dalam membela aliran-aliran sesat pada hakikatnya

¹⁰*Ibid.*, 99.

adalah pembelaan pada paham mereka yakni paham relativisme itu sendiri.

5. *Meyakini Kebebasan Beragama.*

JIL meyakini bahwa urusan beragama dan tidak beragama adalah hak perorangan yang harus dihargai dan dilindungi karena menjunjung tinggi kebebasan beragama. Mereka tidak membenarkan penganiayaan atas dasar suatu pendapat atau kepercayaan.

6. *Memisahkan Otoritas Duniawi dan Ukhrawi, Otoritas Keagamaan dan Politik.*

Karakteristik pemikiran JIL yang keenam ini yang memperlihatkan wajah JIL yang sesungguhnya yang berlandaskan Islam liberal, JIL meyakini bahwa kekuasaan keagamaan dan politik serta otoritas duniawi dan ukhrawi harus dipisahkan. Islam Liberal menentang negara agama (teokrasi). Urusan dunia hanya untuk dunia, sedangkan urusan akhirat terpisah sama sekali dengannya. Agama hanya digunakan pada ritual-ritual ibadah, sedangkan urusan politik dijauhkan sama sekali dari tuntunan-tuntunan agama. Islam liberal yakin bahwa bentuk negara yang sehat bagi kehidupan agama dan politik adalah negara yang memisahkan kedua wewenang tersebut. Agama adalah sumber inspirasi yang dapat mempengaruhi kebijakan publik, tetapi agama tidak punya hak suci untuk menentukan segala bentuk kebijakan publik. Agama berada di ruang privat, dan urusan publik harus diselenggarakan melalui proses konsensus.

D. Wacana Liberalisasi Agama Islam

Mencermati berbagai perkembangan paham Islam liberal dikalangan umat Islam, setidaknya ada tiga aspek penting dalam Islam yang sedang gencar mengalami liberalisasi saat ini, yaitu:

1. Dalam Aspek Syari'at.

Berbagai hukum-hukum yang tetap (qath'iy) dibongkar dan diubah untuk disesuaikan dengan zaman, seperti hukum perzinaan, hukum

homoseksual, hukum murtad, hukum perkawinan antar umat beragama, dan sebagainya. Bagi kaum liberal tidak ada yang tetap dalam agama, sebab mereka memandang agama adalah bagian dari proses dinamika sejarah, sebagaimana kaum Yahudi dan Kristen liberal dalam memandang agama mereka. Padahal Islam bukanlah agama evolutif, yang berkembang mengikuti zaman. Islam adalah agama yang sudah sempurna sejak awal (QS. Al-Maidah (5) : 3). Sejak lahirnya Islam sudah dewasa, bukan lahir bayi, lalu berkembang jadi dewasa, sebagaimana agama-agama sejarah dan budaya, seperti Yahudi, Kristen dan sebagainya. Karena itu konsep dasar aqidah dan ritual (ibadah) dalam Islam bersifat final. Dan tidak berkembang mengikuti proses dinamika sejarah, sebab Islam bukan agama sejarah.

2. Dalam Aspek Al-Qur'an.

Umat Islam Indonesia khususnya sedang memasuki babak baru, dengan dikembangkannya metode studi kritik al-Qur'an, mengikuti metode studi kritik Bible. Kasus penginjakan lafadz Allah di IAIN Surabaya, oleh dosen setempat, 5 Mei 2006, merupakan kasus baru sepanjang sejarah umat Islam. Menurut laporan majalah GATRA edisi 7 Juni 2006, dosen yang bernama Sulhawi Ruba, 51 tahun pada 5 Mei 2006 lalu, itu memang sengaja menginjak-injak lafadz Allah yang ditulisnya pada secarik kertas.¹¹

Dalam pandangan Nasr Hamid misalnya, teks ilahi (*divine text*) berubah menjadi teks manusiawi (*human text*) sejak turunnya wahyu yang pertama kali kepada Muhammad. Nasr Hamid menyatakan: "teks sejak awal diturunkan ketika teks diwahyukan dan dibaca oleh Nabi, ia berubah dari sebuah teks ilahi (*nash ilahi*) menjadi sebuah konsep atau teks

¹¹Adian Husaini, *Liberalisasi Islam Di Indonesia; Fakta Dan Data*, Cetakan III (Jakarta: Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia, 2008), 11-44. Lihat pula Budi Handrianto, *50 Tokoh Islam Liberal Indonesia; Pengusung Ide Sekulerisme, Pluralisme dan Liberalisme Agama* (Jakarta: Hujjah Press, 2007), xxiii-xxiv.

manusiawi (*nash insani*), karena ia berubah dari tanzil menjadi takwil. Pemahaman Muhammad atas teks mempresentasikan tahap paling awal dalam interaksi teks dengan akal manusia.

Dalam pandangan Nasr Hamid, teks al-Qur'an terbentuk dalam realitas dan budaya, selama lebih dari 20 tahun. Oleh sebab itu, al-Qur'an adalah "produk budaya". Ia juga menjadi "produsen budaya" karena menjadi teks yang hegemoni dan menjadi rujukan bagi teks yang lain. Disebabkan realitas dan budaya tidak bisa dipisahkan dari bahasa manusia, maka Nasir Hamid juga menganggap al-Qur'an sebagai teks bahasa (*nash lughawi*). Realitas, budaya dan bahasa merupakan fenomena historis dan mempunyai konteks spesifikasinya sendiri. Oleh sebab itu al-Qur'an adalah teks historis (*a historical text*). Historitas teks, realitas dan budaya sekaligus bahasa, menunjukkan bahwa al-Qur'an adalah teks manusiawi (*nash insani*).¹² Muhammad Arkoun pernah menyatakan, "jika kita terus menerus melihat al-Qur'an sebagai teks agama yang transenden, dalam arti mengandung hakikat yang menjadikan kehadiran Allah itu nyata, maka kita tidak mungkin menghindari problem-problem pemikiran teologis dan penelitian teologis. Urusan teolog tidaklah terbatas pada peran mufti, imam, atau syekh (tokoh agamawan). Teologi lebih fokus pada rasionalitas imam serta lebih berorientasi pada dialektika antara sistem pengetahuan yang ada pada masa tertentu dan problem-problem yang disebabkan mekanisme kerja teks agama atau tradisi agama. *Dus*, dialektika antara tradisi dan sejarah, sekaligus telah melontarkan dilema modernitas dan usaha masalah menjawab kekinian dengan metode rasional yang memperhatikan perkembangan dan perubahan zaman."¹³

¹²Adnin Armas, *Metodologi Bible dalam Studi Al-Qur'an; Kajian Kritis* (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), 72-73.

¹³Fahmi Salim, *Kritik terhadap Studi Al-Qur'an Kaum Liberal* (Jakarta: Perspektif, 2010), 398-399.

Padahal sesungguhnya al-Qur'an bukan produk budaya, karena al-Qur'an merupakan bukanlah hasil kesinambungan dari budaya yang ada. Al-Qur'an justru membawa budaya baru dengan menentang serta mengubah budaya yang ada. Jadi, al-Qur'an bukanlah produk budaya Arab jahiliyah. Namun justru kebudayaan jahiliyah Arab yang diubah pada zaman Rasulullah SAW. Jadi, budaya pada zaman Rasulullah SAW. adalah produk dari pada al-Qur'an, bukan sebaliknya.

Al-Qur'an juga bukan teks bahasa Arab biasa, sebagaimana teks-teks sastra Arab lainnya. Menurut al-Attas, bahasa Arab al-Qur'an adalah bahasa Arab bentuk baru. Sejumlah kosa kata pada saat itu, telah dilisankan maknanya.¹⁴ Jika al-Qur'an produk teks bahasa biasa, maka teks tersebut akan dengan mudah difahami oleh orang Arab pada saat itu. Tetapi kenyataannya justru sebaliknya.¹⁵

3. Pluralisme Agama.

Yang didasarkan pada asumsi bahwa semua agama adalah jalan yang sama-sama sah menuju Tuhan yang sama. Jadi, menurut penganut faham ini semua agama adalah jalan yang berbeda-beda menuju Tuhan yang sama. Tuhan, siapapun namanya tidak menjadi masalah.¹⁶

E. Studi Kritis Dakwah Atas Liberalisme

Dakwah mengandung suatu pengertian dan sebagai suatu kegiatan atau ajakan, baik bentuk lisan, tulisan, tingkah laku dan sebagainya. Yang dilakukan secara sadar dan terencana dalam usaha mempengaruhi orang lain, baik secara individual maupun kelompok, agar supaya timbul dalam dirinya suatu pengertian dan sikap, penghayatan serta pengalaman, terhadap ajaran agama sebagai *massage* yang disampaikan kepadanya dengan tanpa ada unsur-unsur paksaan.¹⁷ Dalam hal ini dakwah dapat diartikan sebagai

¹⁴Adnin Armas, *Metodologi Bible dalam Studi Al-Qur'an; Kajian Kritis...*, 75.

¹⁵*Ibid.*, 77.

¹⁶Budi Handrianto, *50 Tokoh Islam Liberal Indonesia...*, xxxi.

¹⁷Arifin, *Psikologi Dakwah* (Jakarta: Bulan Bintang, 1977), 17.

seruan, ajakan, dan panggilan.¹⁸ Dapat pula diartikan mengajak, menyeru, memanggil dengan lisan ataupun dengan tingkah laku atau perbuatan nyata.¹⁹

Oleh karena itu dibutuhkan solusi absolut yang mampu memperbaiki kondisi pemahaman mad'u agar tidak larut dengan pemahaman "sesat" liberalisme di Indonesia. Hal ini disebabkan tantangan dakwah yang dihadapi dewasa ini sebenarnya bukan hanya dalam bidang ekonomi, politik, sosial dan budaya saja, akan tetapi tantangan hasil pemikiran yang tak kalah hebatnya sedang dihadapi. Sebab persoalan yang ditimbulkan oleh bidang-bidang ekonomi, politik, sosial, budaya dan agama ternyata bersumber dari pemikiran juga. Di antara tantangan pemikiran yang paling serius saat ini, adalah di bidang pemikiran keagamaan. Tantangan yang paling mendasar dan sudah lama disadari adalah tantangan internal yang berupa kejumudan, fanatisme, taklid buta, tahyul, bid'ah, kurafat, dan sebagainya. Sedangkan tantangan eksternal yang sedang dihadapi saat ini adalah masuknya berbagai wacana pemikiran keagamaan, seperti paham liberalisme, sekulerisme, relativisme, pluralitas agama dan lain sebagainya. Istilah paham ini lahir di Barat dan dikembangkan sebagai pemikiran dalam keagamaan. Beberapa waktu yang lalu MUI mengeluarkan fatwa tentang haramnya pluralism agama di samping sekularisme, dan liberalisme. Fatwa itu telah memicu gelombang pro-kontra dengan argumen masing-masing.²⁰

Namun, apapun pro-kontra yang muncul di tengah-tengah masyarakat, dalam perspektif dakwah tetap harus disikapi dengan arif dan bijaksana. Hal ini disebabkan Islam yang diusung adalah Islam yang *rahmatan lil alamin*, Islam untuk semua manusia. Oleh karena itu, dakwah perlu dikemas

¹⁸Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsiran Al-Qur'an, 1972), 27.

¹⁹Masdar Farid Mas'udi, *Dakwah Membela Kepentingan Siapa* (Jakarta: P3M Pesantren, 1987), 2.

²⁰Abd. Moqsih Ghazali, *Argumen Pluralisme Agama; Membangun Toleransi Berbasis Al-Qur'an* (Jakarta: Katakita, 2009), 401.

sedemikian rupa sehingga mampu menyentuh substansi Islam yang sesungguhnya.

Lebih lanjut kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan adalah 1) menekan "monopoli" kelompok liberal dan sekutunya dalam menjelaskan dan menafsirkan Islam. 2) menghimpun ulama dan cendekia yang memiliki pemikiran Islam berkemajuan dan jauh dari Islam yang kebablasan untuk menjawab berbagai pertanyaan kelompok liberal dengan membuat website kemudian menawarkan ajaran Islam yang sesungguhnya. 3) mendorong cendekiawan anti liberal untuk menulis buku teks dan mengembangkan kurikulum dan berilah bantuan finansial. 4) memanfaatkan media regional yang populer, seperti radio, untuk memperkenalkan pemikiran-pemikiran cendekiawan anti liberal agar dunia internasional melek tentang apa arti Islam yang sebenarnya.

Selain langkah-langkah tersebut di atas, dakwah perlu lebih intensifkan agar tidak semakin kusut dan berlarut-larut dengan jalan :

1. Mengoptimalkan lembaga dan organisasi Islam untuk melakukan kaderisasi sehingga juru-juru dakwah bisa berbagi kerja dengan rapi dan menguasai ilmu-ilmu teknologi informasi yang paling mutakhir.
2. Setiap lembaga atau organisasi Islam perlu membangun dan mengoptimalkan laboratorium dakwah untuk mengetahui masalah-masalah riil di lapangan, sehingga jelas apa yang akan dan harus dilakukan.
3. Proses dakwah tidak boleh lagi terbatas pada dakwah *bil-lisan*, tapi harus diperluas dengan dakwah *bil-hal*, *bil-kitaabah* (lewat tulisan), *bil-hikmah* (dalam arti politik), *bil-iqtishadiyah* (ekonomi), dan sebagainya
4. Media massa cetak dan terutama media elektronik harus dipikirkan sekarang juga. Media elektronik yang dapat menjadi wahana atau sarana dakwah perlu dimiliki oleh umat Islam. Bila udara Indonesia di masa depan dipenuhi oleh pesan-pesan agama lain dan sepi dari

pesan-pesan Islami, maka sudah tentu keadaan seperti ini tidak menguntungkan bagi peningkatan dakwah Islam di tanah air.

5. Merebut remaja Indonesia adalah tugas dakwah Islam jangka panjang. Anak-anak dan para remaja kita adalah aset yang tak ternilai. Mereka wajib kita selamatkan dari pengikisan aqidah yang terjadi akibat "kooptasi dan invasi" nilai-nilai liberalism dan nilai-nilai non Islami ke dalam jantung berbagai komunitas Islam di Indonesia. Bila anak-anak dan remaja kita memiliki benteng tangguh dalam era globalisasi dan informasi sekarang ini, insya Allah masa depan dakwah kita akan tetap ceria.
6. Menata kembali manajemen dakwah agar lebih profesional dan *dihandle* oleh tenaga-tenaga berdedikasi tinggi, mau berkorban dan ikhlas beramal. Kita harus mengakomodir segenap permasalahan dan tantangan yang muncul, agar dapat memilih dan memilah skala prioritas dalam penanganannya, sehingga dana, tenaga, dan fikiran dapat lebih terarah, efektif, dan produktif dalam melaksanakan dakwah.

Metode dakwah yang dapat diaplikasikan dalam berbagai pendekatan, di antaranya yaitu :

1. Pendekatan Personal; pendekatan dengan cara ini terjadi dengan cara individual yaitu antara da'i dan mad'u langsung bertatap muka sehingga materi yang disampaikan langsung diterima dan biasanya reaksi yang ditimbulkan oleh mad'u akan langsung diketahui.
2. Pendekatan Pendidikan; pada masa Nabi, dakwah lewat pendidikan dilakukan beriringan dengan masuknya Islam kepada kalangan sahabat. Begitu juga pada masa sekarang ini, kita dapat melihat pendekatan pendidikan teraplikasi dalam lembaga-lembaga pendidikan pesantren, yayasan yang bercorak Islam ataupun perguruan tinggi yang di dalamnya terdapat materi-materi keislaman.

3. Pendekatan Diskusi; pendekatan diskusi pada era sekarang sering dilakukan lewat berbagai diskusi keagamaan, da'i berperan sebagai narasumber sedang mad'u berperan sebagai audience.
4. Pendekatan Penawaran; cara ini dilakukan Nabi dengan memakai metode yang tepat tanpa paksaan sehingga mad'u ketika meresponinya tidak dalam keadaan tertekan bahkan ia melakukannya dengan niat yang timbul dari hati yang paling dalam.
5. Pendekatan Misi; maksud dari pendekatan ini adalah pengiriman tenaga para da'i ke daerah-daerah di luar tempat domisili.

F. Kesimpulan

Berdasarkan Pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa asas pemikiran liberal adalah kebebasan berfikir dan individualisme dan tidak dibangun di atas dalil al-Qur'an dan Hadits. Islam memandang liberalisme sebagai sebuah penyimpangan pemikiran dan pemahaman terhadap teks al-Qur'an dan Hadits. Selain itu, Wacana liberalisme di Indonesia secara garis besarnya, yaitu liberalisme aqidah, liberalisme al-Qur'an dan Liberalisme Syari'at Islam. Kemunculan JIL (Jaringan Islam Liberal) di Indonesia berperan sebagai *counter discourse* bagi kelompok-kelompok radikal-konservatif Muslim yang selalu menyerukan penerapan syariat dan pembentukan negara Islam Indonesia. Bagi JIL, Indonesia adalah bangsa majemuk/plural yang membutuhkan ruang publik. Apapun yang menyangkut urusan bersama harus dimusyawarahkan secara bebas dan demokratis. Selama keberadaannya, JIL terus mendukung sistem demokrasi, kebebasan, dan kesetaraan sosial. Sedangkan secara ideologis, terbentuknya JIL dapat dilihat sebagai kristalisasi dan kelanjutan dari pemikiran dan gerakan Islam sebelumnya, baik dalam lingkup Indonesia secara khusus maupun di dunia secara umum.

DAFTAR PUSTAKA

- Armas, Adnin, *Metodologi Bible dalam Studi Al-Qur'an; Kajian Kritis* (Jakarta: Gema Insani Press, 2005)
- Arifin, *Psikologi Dakwah* (Jakarta: Bulan Bintang, 1977)
- Barton, Greg., *Gagasan Islam Liberal Di Indonesia* (Jakarta: Paramadina, 2002)
- Sjafril, Akmal, *Islam Liberal 10* (Bogor: Afnan Publishing, 2015)
- Ghazali, Abd., Moqsith, *Argumen Pluralisme Agama; Membangun Toleransi Berbasis Al-Qur'an* (Jakarta: Katakita, 2009)
- Jaiz, Hartono Ahmad, *Menangkal Bahaya JIL FLA* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005)
- Husaini, Adian, *Liberalisasi Islam di Indonesia* (Jakarta: Gema Insani, 2015)
- Liberalisasi Islam Di Indonesia; Fakta Dan Data, Cetakan III* (Jakarta: Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia, 2008)
- Handrianto, Budi, *50 Tokoh Islam Liberal Indonesia; Pengusung Ide Sekulerisme, Pluralisme Dan Liberalisme Agama* (Jakarta : Hujjah Press, 2007)
- Mas'udi, Masdar Farid, *Dakwah Membela kepentingan Siapa* (Jakarta: P3M Pesantren, 1987)
- Salim, Fahmi, *Kritik terhadap Studi Al-Qur'an Kaum Liberal* (Jakarta: Perspektif, 2010)
- Setiawan, Nur Kholis, *Akar-Akar Pemikiran Progresif dalam Kajian Al-Qur'an* (Yogyakarta: Elsaq, 2008)
- Surahman, Cucu, "Tafsir Kontekstual JIL: Telaah atas Konsep Syariat Islam dan Hudud", dalam *Journal of Qur'an and Hadith Studies*, Vol. 2 No. 1 (Tahun 2013)
- Syafrin, Nirwan, *Kritik Terhadap Paham Liberalisasi Syariat Islam* (Jakarta: Dewan Dakwah Islamiyyah Indonesia, 2008)
- Yunus, Mahmud, *Kamus Arab-Indonesia* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsiran Al-Qur'an, 1972)